



Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Kabupaten/Kota Di Provinsi NTB)

Lita Apriska¹, M. Irwan², Ida Ayu Putri Suprapti³, Jaka Anggara⁴
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Kata Kunci

Kata kunci:

Indeks Pembangunan Manusia, Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terhadap Indeks pembangunan manusia. Jumlah populasi yang di gunakan dalam penelitian ini 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 10 tahun terakhir. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode sample survey. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel yang di olah menggunakan aplikasi Eviews 10. Hasil analisis dalam penelitian ini adalah Secara Parsial pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks pembangunan manusia dan kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks pembangunan manusia. Sedangkan secara simultan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap Indeks pembangunan manusia.

Keywords

Keywords:

Human Development Index, Health Sector Government Expenditure, Economic Growth, Poverty

Abstract

This study aims to analyze the effect of government spending on the health sector, economic growth and poverty on the human development index. The population used in this study is 10 regencies / cities in West Nusa Tenggara Province for the last 10 years. The data collection method used is the sample survey method. The data analysis method in this study uses panel data regression processed using the Eviews 10 application. The results of the analysis in this study are Partially government spending in the health sector has a positive and significant effect on the human development index, economic growth has a positif and significant effect on the human development index and poverty has a negative and significant effect on the human development index. While simultaneously government spending in the health sector, economic growth and poverty have a significant effect on the human development index.

*Corresponding Author: **Lita Apriska**, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia
Email: apriskalita@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.29303/jseh.v10i1.451>

History Artikel:

Received: 8 Januari 2024 | Accepted: 15 Maret 2024

PENDAHULUAN

Menurut *United Nations Development Program* pembangunan manusia didefinisikan sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan yang lebih banyak kepada penduduk melalui upaya-upaya pemberdayaan yang mengutamakan peningkatan kemampuan dasar manusia agar dapat sepenuhnya berpartisipasi di segala bidang pembangunan. Pembangunan pada awalnya hanya diarahkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai wujud tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggi pada suatu negara, namun kenyataannya pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggi khususnya pada Negara yang sedang berkembang (Kisnawati, 2015). Secara konsep pembangunan manusia merupakan upaya yang dilakukan untuk memperluas peluang penduduk dalam mencapai hidup layak, yang secara umum dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas dasar, daya beli, pendidikan dan kesehatan yang baik dan secara merata (Tjodi et al., 2019).

Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan pembangunan dan bukan semata – mata sebagai alat pembangunan. Sumber daya pembangunan tidak lagi memposisikan prioritas pada kekuatan sumber daya alam melainkan pada kekuatan sumber daya manusia. Dengan demikian, salah satu indikator yang dapat mengukur kualitas manusia dan skala ekonomi adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yang dilihat dari kualitas fisik dan non fisik penduduk.

United Nations Development Program (UNDP) telah menerbitkan indikator IPM untuk mengukur kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara atau wilayah dalam bidang pembangunan manusia. Sejak pertama kali diperkenalkan oleh UNDP, IPM terus mendapat banyak sorotan dan dukungan yang mengalir, tetapi tidak sedikit kritikan terhadap indikator ini. Sebagian pihak berpendapat bahwa indikator yang tercakup di dalam IPM kurang mewakili pembangunan. Para pakar terus bekerja untuk mendalami lebih jauh tentang pembangunan manusia. Tidak hanya itu, mereka terus melakukan kajian untuk menyempurnakan penghitungan IPM. Hal itu terutama dilakukan pada indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM. Tercatat bahwa UNDP melakukan dua kali penyempurnaan pada tahun 1991 dan 1995 dan perubahan di tahun 2010 (Badan Pusat Statistik (BPS), 2015).

Ketika diperkenalkan pada tahun 1990, para ahli menyebutnya sebagai Indeks Pembangunan

Manusia (Human Development Index) yang kemudian secara rutin dipublikasikan setiap tahun dalam Laporan Pembangunan Manusia (Human Development Report). Kala itu, IPM dihitung melalui pendekatan dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan angka harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan yang diukur dengan angka melek huruf dewasa, serta dimensi standar hidup layak yang diukur dengan PDB per kapita. Untuk menghitung ketiga dimensi menjadi sebuah indeks komposit, digunakan rata-rata aritmatik. Setahun berselang, UNDP melakukan penyempurnaan penghitungan IPM dengan menambahkan variabel rata-rata lama sekolah ke dalam dimensi pengetahuan. Akhirnya, terdapat dua indikator dalam dimensi pengetahuan yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Karena terdapat dua indikator dalam dimensi pengetahuan, UNDP memberi bobot untuk keduanya. Indikator angka melek huruf diberi bobot dua per tiga, sementara indikator rata-rata lama sekolah diberi bobot sepertiga. Hingga tahun 1994, keempat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM masih cukup relevan. Namun akhirnya, pada tahun 1995 UNDP kembali melakukan penyempurnaan metode penghitungan IPM. Kali ini, UNDP mengganti variabel rata-rata lama sekolah menjadi gabungan angka partisipasi kasar. Pembobotan tetap dilakukan dengan metode yang sama seperti sebelumnya (Badan Pusat Statistik (BPS), 2015).

Pada tahun 2010, UNDP merubah metodologi penghitungan IPM. Kali ini perubahan drastis terjadi pada penghitungan IPM. UNDP menyebut perubahan yang dilakukan pada penghitungan IPM sebagai metode baru. Beberapa indikator diganti menjadi lebih relevan, dimana indikator angka melek huruf dan gabungan angka partisipasi kasar diganti dengan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, indikator angka harapan hidup saat lahir diganti menjadi angka harapan hidup. Indikator PDB per kapita juga diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita akan tetapi mengingat tidak semua wilayah di Indonesia memiliki indikator tersebut, maka dipilih alternatif lain dengan memanfaatkan komponen pengeluaran perkapita disesuaikan dan metode rata-rata aritmatik diganti menjadi rata-rata geometrik untuk menghitung indeks komposit. Perubahan yang dilakukan UNDP tidak hanya sebatas itu. Setahun kemudian, UNDP menyempurnakan penghitungan metode baru. UNDP merubah tahun dasar penghitungan PNB per kapita. Tiga tahun berselang, UNDP melakukan penyempurnaan kembali penghitungan metode baru. Kali ini, UNDP merubah metode agregasi indeks pendidikan dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmatik dan tahun dasar PNB per kapita (Badan Pusat Statistik (BPS),

2015).

Serangkaian perubahan yang dilakukan tersebut karena beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Sebelum penghitungan metode baru digunakan, AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar wilayah dengan baik. Dalam konsep pembentukan indeks komposit, variabel yang tidak sensitif membedakan akan menyebabkan indikator komposit menjadi tidak relevan. Oleh karena itu, indikator AMH dianggap sudah tidak relevan sebagai komponen dalam penghitungan IPM. Selanjutnya adalah indikator PDB per kapita. Indikator ini pada dasarnya merupakan proksi terhadap pendapatan masyarakat. Namun disadari bahwa PDB diciptakan dari seluruh faktor produksi dan apabila ada investasi dari asing turut diperhitungkan. Padahal, tidak seluruh pendapatan faktor produksi dinikmati penduduk lokal. Oleh karena itu, PDB perkapita kurang dapat menggambarkan pendapatan masyarakat atau bahkan kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah. Perubahan yang dilakukan UNDP bertujuan agar dapat membuat suatu indeks komposit yang cukup relevan dalam mengukur pembangunan manusia. Perubahan terakhir yang dilakukan oleh UNDP masih diterapkan sampai sekarang (Badan Pusat Statistik (BPS), 2015).

Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia. Meningkatnya nilai IPM menunjukkan bahwa terjadi peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas pada suatu daerah. Sumber daya manusia merupakan subjek dan objek pembangunan, hal ini mengindikasikan bahwa manusia selain sebagai pelaku dari pembangunan juga merupakan sasaran pembangunan. Dengan demikian, peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan unsur pembangunan yang sangat penting (Fajri, 2021). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia yaitu pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, belanja modal, jumlah penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja, pendidikan, kesehatan, teknologi dan lain sebagainya (Lumi et al., 2022).

Salah satu faktor yang mempengaruhi IPM adalah pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah (*Government Expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan

pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah (Nahumuri, 2019). Pengeluaran pemerintah adalah dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pengembangan sarana dan prasarana agar semakin baik dan lengkap. Prasarana dan layanan pemerintah yang berkaitan dengan Pembangunan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur ekonomi akan berakibat pada percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia (Lumi et al., 2022). Dalam penelitian ini variabel pengeluaran pemerintah yang difokuskan untuk diteliti adalah Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan. Karena dalam pengukuran IPM, kesehatan adalah komponen utama selain pendidikan dan pendapatan, karena Kesehatan juga merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan (Kisnawati, 2015).

Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan merupakan Faktor ke-1 yang mempengaruhi IPM. pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar masyarakat yaitu untuk memperoleh pelayanan penyerapan tenaga kerja yang dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Dimana dengan adanya pergeseran kegiatan masyarakat dari sektor tradisional ke sektor modern untuk mendapatkan pendapatan perkapita masyarakat juga dapat meringankan beban fisik masyarakat yang dapat berpengaruh kepada kondisi kesehatan masyarakat (Maulina & Andriyani, 2020). Pemerintah mengalokasi anggaran sebesar 5% (lima Persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara diluar gaji, sementara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar 10% (Sepuluh Persen) dari anggaran pendapatandan belanja daerah diluar gaji. Tujuannya adalah untuk tercapainya derajat kesehatan yang terus membaik dan penggunaan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang dasar 1945 Pasal 28 H ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan (Kuncoro, 2013).

Pengeluaran pemerintah dalam sektor kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. (Todaro & Smith, 2011) menyatakan pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan yang dikeluarkan untuk memenuhi salah satu hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan berupa fasilitas. Investasi pemerintah di sektor kesehatan akan memberikan

kesempatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih merata kepada masyarakat sehingga sumber daya manusia yang handal dan sehat akan semakin bertambah. Meningkatnya taraf kesehatan akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang pada akhirnya akan menciptakan perbaikan ekonomi masyarakat. Meningkatnya kondisi ekonomi serta kualitas kesehatan masyarakat yang tercermin pula pada meningkatnya angka harapan hidup berarti pula akan mendorong peningkatan IPM karena hal tersebut merupakan komposit pembentuk IPM (Bitu Lailatul Yasinta, 2018).

Beberapa penelitian mengenai pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia yang dilakukan oleh (Setyawan, 2020), (Maulina & Andriyani, 2020), dan (Soleha & Fathurrahman, 2017) menyatakan pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Mongan, 2019), (Sanggalorang et al., 2015) dan (Listianingsih et al., 2022) menyatakan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Faktor ke-2 yang dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam angka PDRB atau PDB suatu daerah dapat menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat (Syofya, 2018).

Hubungan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Indeks Pembangunan Manusia sangatlah erat, ketika Produk Domestik Regional Bruto pada suatu daerah tinggi maka hal itu menunjukkan bahwa pembangunan manusia pada daerah tersebut baik, ketika Produk Domestik Regional Bruto tinggi dan pembangunan manusia baik maka pendapatannya juga akan tinggi, pendapatan yang

tinggi didapatkan dari upaya penduduk yang memaksimalkan kemampuan mereka dengan baik. Oleh karena itu hubungan antara Produk Domestik Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia sangatlah erat (Fajri, 2021).

Beberapa penelitian mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia telah dilakukan. (Mirza, 2011), (Primandari, 2020), dan (Laode et al., 2020) menyatakan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh (Mayang Dwi Pitaloka & P.S Prabowo, 2022), (Bahriyah & Primandhana, 2022), dan (Saputra & Muslim, 2018) menyatakan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Faktor ke-3 yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu hambatan dalam meningkatkan kesejahteraan karena kemiskinan mempunyai tolak ukur yang bukan hanya kekurangan dalam tingkat pendapatan yang rendah, akan tetapi tingkat kesehatan, pendidikan dan sebagainya (Pasuloi, 2020). Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, sehingga kemiskinan menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Penduduk yang miskin memiliki kemampuan daya beli yang rendah sehingga standar hidupnya tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Kemiskinan dilihat dari besarnya jumlah penduduk miskin yang ada di daerah tersebut yang memiliki standar hidup yang rendah sehingga dapat berpengaruh buruk terhadap pembangunan manusia, karena standar hidup layak merupakan salah satu unsur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Fajri, 2021). Oleh karena itu tingkat kemiskinan dapat mempengaruhi nilai indeks pembangunan manusia. Karena pada dasarnya penduduk yang besar namun dengan kualitas sumber daya manusia yang relatif kurang sangat berpotensi memberikan beban dalam pembangunan di daerah itu sendiri (Laode et al., 2020).

Hubungan kemiskinan dengan Indeks Pembangunan Manusia adalah jika tingkat kemiskinan mengalami kenaikan maka Indeks Pembangunan Manusia akan mengalami penurunan, hal ini terjadi karena ketika jumlah penduduk miskin meningkat berarti banyak masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya seperti memiliki biaya pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Sebaliknya ketika kemiskinan mengalami penurunan maka Indeks Pembangunan Manusia akan mengalami kenaikan (Lumi et al., 2022).

Beberapa penelitian mengenai pengaruh

tingkat kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah dilakukan (Invantoro & Efriyenti, 2019), (A. Mahendra, 2020), dan (Ningrum et al., 2020a) menyatakan kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Umiyati et al., 2017), (Hidayat & Woyanti, 2021), (Zakaria, 2018) menyatakan kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mengalami peningkatan

setiap tahunnya. Menurut data badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022 Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat berada Pada Urutan ke 29 dari 34 Provinsi di Indonesia, dan tergolong dengan kategori yang memiliki capaian IPM yang sedang dengan nilai IPM 66,75 atau lebih rendah dari capaian standar IPM nasional yang mencapai 72,29. Data Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi NTB 2013-2022

Kabupaten/Kota	IPM Kabupaten/Kota Provinsi NTB										rata - rata
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Kabupaten Lombok Barat	62.91	63.52	64.62	65.55	66.37	67.18	68.03	68.20	68.61	69.41	66.44
Kabupaten Lombok Tengah	61.25	61.88	62.74	63.22	64.36	65.36	66.36	66.43	66.72	67.57	64.59
Kabupaten Lombok Timur	61.43	62.07	62.83	63.70	64.37	65.35	66.23	66.30	66.66	67.59	64.65
Kabupaten Sumbawa	62.44	62.88	63.91	64.89	65.84	66.77	67.60	67.61	68.01	68.89	65.88
Kabupaten Dompu	63.16	63.53	64.56	65.48	66.33	66.97	67.83	67.84	68.45	69.15	66.33
Kabupaten Bima	62.08	62.62	63.48	64.15	65.01	65.62	66.37	66.30	66.66	67.57	64.99
Kabupaten Sumbawa Barat	66.86	67.19	68.38	69.26	70.08	70.71	71.52	71.63	71.85	72.65	62.90
Kabupaten Lombok Utara	59.20	60.17	61.15	62.24	63.04	63.83	64.49	64.42	64.77	65.70	62.90
Kota Mataram	75.22	75.93	76.37	77.20	77.84	78.43	79.10	78.91	79.14	79.59	77.77
Kota Bima	71.72	72.23	72.99	73.67	74.36	75.04	75.80	75.81	76.11	76.84	74.46

Sumber: BPS Provinsi NTB,

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa 10 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi NTB. Kota Mataram merupakan 10 dari Kabupaten/Kota yang memiliki IPM tertinggi selama 2013-2022 yaitu 77,77 diikiuti dengan Kabupaten Bima sebesar 74,46, sedangkan yang memiliki IPM terendah adalah Kabupaten Lombok Utara, dan Kabupaten Sumbawa Barat dengan IPM 62,90 diikiuti dengan Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Tengah dengan nilai IPM masing – masing 64,65 dan 64,59. Hal ini menunjukkan bahwa belum meratanya pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut terdapat fenomena yang terjadi yaitu adanya kenaikan Indeks Pembangunan Manusia setiap tahunnya yang tidak diikiuti dengan kenaikan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut tidak sejalan dengan teori Profesor Kuznet yang menyatakan

meningkatnya PDRB akan meningkatkan pertumbuhan output perkapita serta mengubah pola konsumsi masyarakat dan daya beli masyarakat sehingga akan meningkatkan Index Pembangunan Manusia dan teori yang dikemukakan oleh Adolf Wagner yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah akan semakin meningkat yang disebabkan oleh adanya peningkatan fungsi kesejahteraan masyarakat dan fungsi pembangunan, serta terdapat beberapa perbedaan terhadap hasil penelitian sebelumnya. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali untuk melihat apakah pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan berpengaruh terhadap Indeks pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di provinsi Nusa Tenggara Barat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif adalah salah satu jenis penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan atau asosiasi antara dua variabel atau lebih (Ghozali, 2016). Penelitian ini dilakukan guna untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2013-2022. Populasi dalam penelitian ini adalah semua Kabupaten/Kota yang

ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2013-2022 yang berjumlah 10 Kabupaten/Kota.

Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan. Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Statistik Deskriptif

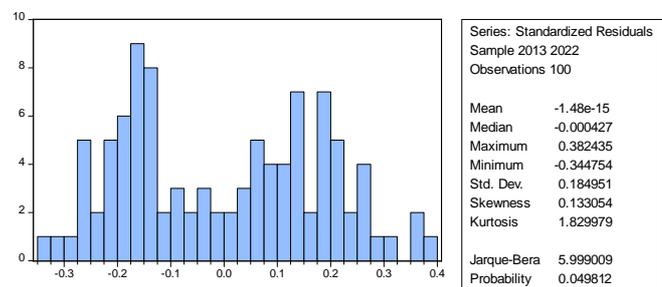
Tabel 2 Analisis Statistik Deskriptif

	Y	X2	X3	X4
Mean	8.228870	444851.6	2.439274	8.232851
Median	8.164558	444605.8	2.428992	8.205991
Maximum	8.921323	806543.9	2.924038	14.90604
Minimum	7.694154	173080.8	1.843909	3.828838
Std. Dev.	0.298648	129423.8	0.251541	3.082938
Skewness	0.736118	0.177867	-0.112924	0.469586
Kurtosis	2.679059	2.561142	2.530193	2.424291
Jarque-Bera	9.460341	1.329760	1.132189	5.056191
Probability	0.008825	0.514335	0.567738	0.079811
Sum	822.8870	44485161	243.9274	823.2851
Sum Sq. Dev.	8.829850	1.66E+12	6.263992	940.9459
Observations	100	100	100	100

Sumber: output eviws 10 (2023)

Dari tabel di atas menunjukkan nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, median, standar deviasi, skewnees dan kurtosis. Variabel indeks Pembangunan manusia memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 8.22, yang berarti nilai rata-rata Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 10 tahun terakhir senilai 8.22. Variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 444605.8 milyar rupiah. ini berarti nilai rata-rata pengeluaran pemerintah sektor kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 10 tahun terakhir sebesar 444851.8 milyar rupiah. Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 2,50 persen. ini berarti nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 10 tahun terakhir sebesar 2.50 persen. Variabel kemiskinan memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 8.2328 ribu jiwa. ini berarti nilai rata-rata kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 10 tahun terakhir sebesar 8.2328 ribu jiwa.

Uji Normalitas



Sumber: output Eviws (2023)

Gambar 1 Uji Normalitas

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa nilai probabilitas *Jarque-Bera* (JB) sebesar 0,049812 atau 0,050, yang dimana nili ini sama besarnya dengan nilai signifikansi 0,05 atau 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa data ini berdistribusi normal.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klaisk dalam penelitian ini adalah pengujian terhadap tiga asumsi kalsik yaitu: multikolinieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Uji multikolinieritas dilihat dari koefisien korelasi antar

variabel yang lebih besar dari 0,8. Jika variabel terdapat koefisien koefisien korelasi lebih dari 0,8 atau mendekati 1 maka 2 atau lebih variabel bebas terjadi multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas menunjukkan nilai koefisien korelasi antara variabel Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan tidak lebih dari 0,8 yang berarti bahwa tidak terjadi masalah multikolinieritas pada model regresi tersebut.

Uji autokorelasi dalam penelitian dilakukan dengan cara melihat angka *Durbin Watson* (DW) pada model regresi. Dikatakan tidak terjadi autokorelasi positif atau negatif apabila $d_u < d < 4 - d_u$. Hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa bahwa nilai *Durbin-Watson* (DW) yaitu sebesar 0,212235. Nilai *Durbin Watson* Upper dengan jumlah sampel (t) sebanyak 100 dan jumlah variabel bebas (k) 3 memiliki nilai sebesar 1,7582. Persamaan dari rumus $d_u < d < 4 - d_u$ terbentuk menjadi $1,7364 > 0,220313 < 2,2636$. Dilihat dari hasil uji DW menunjukkan adanya gejala autokorelasi. Menurut Basuki & Prawoto (2017) uji autokorelasi tidak harus digunakan dalam setiap regresi data panel. Karena uji autokorelasi hanya dapat digunakan pada data *time series*, sehingga pengujian autokorelasi yang dilakukan pada data panel tidak berarti. Oleh karena itu penelitian yang menggunakan data panel dapat mengabaikan uji autokorelasi.

Uji heteroskedastisita pada penelitian ini menggunakan uji park. Hasil uji heteroskedastisitas dengan uji park menunjukkan nilai probabilitas dari masing-masing variabel independen memiliki nilai lebih besar dari nilai signifikan 0,05 atau 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi.

Analisis Regresi Data Panel

Hasil dari uji model persamaan data panel dilakukan untuk menguji hipotesis dari penelitian. Model yang terpilih adalah Random Effect Model (REM). Model tersebut yang dapat merepresentasikan tujuan dari penelitian ini. Pengujian dilakukan dengan menggunakan Eviews 10 dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 3 Analisis Regresi Data Panel

Dependent Variable: Y				
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)				
Date: 03/20/24 Time: 08:36				
Sample: 2013 2022				
Periods included: 10				
Cross-sections included: 10				
Total panel (balanced) observations: 100				
Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8.269965	0.246097	33.60446	0.0000
X1	7.58E-07	9.23E-08	8.212050	0.0000
X2	0.153089	0.065429	2.339763	0.0214
X3	-0.091315	0.018635	-4.900175	0.0000
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.211564	0.8989
Idiosyncratic random			0.070968	0.1011
Weighted Statistics				
R-squared	0.668652	Mean dependent var	8	0.86802
Adjusted R-squared	0.658297	S.D. dependent var	4	0.12227
S.E. of regression	0.071476	Sum squared resid	4	0.49044
F-statistic	64.57513	Durbin-Watson stat	9	0.85718
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: output Eviews (2023).

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel pada tabel menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan memiliki nilai probabilitas sebesar $0,0000 < 0,05$ atau 5%. Hasil ini membuktikan

bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tahun 2013-2022 berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini dikarenakan anggaran untuk sektor kesehatan yang dikeluarkan pemerintah untuk pelayanan kesehatan didukung dengan adanya sarana serta prasarana penunjang kesehatan yang berkualitas. Berdasarkan data jumlah fasilitas pelayanan kesehatan tahun 2020, jumlah rumah sakit di provinsi NTB sebanyak 39 rumah sakit serta 1.028 puskesmas dan jaringannya (Data NTB Satu, 2022). Selain itu masyarakat di NTB juga di fasilitasi dengan pemberian bantuan kesehatan dalam bentuk jaminan sosial yang disebut dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam bidang asuransi kesehatan. Hal tersebut menjadi salah satu penunjang utama dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat terutama di NTB. Sehingga masyarakat yang memiliki kualitas kesehatan yang baik akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyawan (2020), Maulina & Andriyani (2020), dan Soleha & Fathurrahman (2017) yang menyatakan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai probabilitas sebesar $0,0214 < 0,05$ atau 5%. Hasil ini membuktikan pertumbuhan ekonomi tahun 2013-2022 berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Kabupaten/kota di provinsi Nusa Tenggara Barat. Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu provinsi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil. Saat ini pengembangan pariwisata menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru di NTB. Sektor pariwisata di NTB mulai menggeliat yang ditandai dengan tumbuhnya perekonomian pada triwulan I-2022 sebesar 7,73% (yoy). Angka ini menjadi laju pertumbuhan tertinggi dalam rentang waktu 5 tahun. Adanya even motorGP menjadi icon baru di NTB. Even ini mendatangkan pemasukan melalui perputaran dana penonton selama tiga hari saat penyelenggaraan motoGP 2022 sebesar Rp 697,88 miliar baik dari akomodasi maupun penjualan makanan dan minuman. Selain itu, serapan tenaga kerja selama motoGP 2022 mencapai 4600 orang. Hal ini menjadi salah satu

langkah dalam mendongkrak perekonomian di provinsi NTB setelah selama 2 tahun mengalami kelesuan ekonomi akibat covid 19. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mirza (2011), Primandari (2020), dan Laode et al., (2020) menyatakan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Pengaruh Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil analisis data regresi data panel menunjukkan bahwa variabel kemiskinan nilai probabilitas sebesar $0,0000 < 0,05$ atau 5%. Hasil ini membuktikan kemiskinan tahun 2013-2022 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini dikarenakan Provinsi NTB mengalami penurunan kemiskinan pada tahun 2022 namun keadaan ini berbanding terbalik dengan kondisi lapangan. Di NTB masih terdapat ketimpangan dan distribusi angka kemiskinan yang tidak merata antar Kabupaten/Kota di Provinsi NTB. Berdasarkan data BPS 2022 menunjukkan masih terdapat 5 Kabupaten dengan angka kemiskinan lebih tinggi dari rata-rata kemiskinan Provinsi NTB sebesar 13,68%. Angka kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Lombok Utara sebesar 27,04% dan angka kemiskinan terendah berada di Kota Mataram sebesar 8,65%. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa adanya tingkat kemiskinan yang tinggi berpengaruh terhadap rendahnya indeks pembangunan manusia di NTB ataupun sebaliknya rendahnya tingkat kemiskinan akan berpengaruh terhadap tingginya indeks pembangunan manusia di NTB. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Umiyati et al., (2017), Hidayat & Woyanti (2021), dan Zakaria (2018) menyatakan kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

KESIMPULAN

Secara parsial Pengeluaran pemerintah sektor Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini di buktikan dengan koefisien data panel bernilai positif sebesar 7.5814 dengan probabilitas sebesar $0,0000 < 0,05$. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini dibuktikan dengan koefisien data panel yang bernilai sebesar 0,1530 dengan nilai probabilitas sebesar $0,0214 < 0,05$.

Dan Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini dibuktikan dengan koefisien regresi data panel bernilai sebesar $-0,091315$ dengan probabilitas sebesar $0,0000 < 0,05$. Sedangkan secara simultan pengeluaran pemerintah sektor Kesehatan, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan berpengaruh terhadap indeks Pembangunan manusia.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih sebesar-besarnya kepada orang tua saya bapak Muslim dan Ibu Siti Aminah yang telah mendidik, mendoakan, membesarkan dan memberikan semangat yang begitu luar biasa dan penuh kasih sayang. Ucapan terimakasih saya sampaikan pula kepada Bapak Dr. M. Irwan, MP selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dra. Ida Ayu Putri Suprapti, M.A selaku Pembimbing Pendamping, atas waktu yang diberikan untuk bimbingan, masukan-masukan dan dorongan yang diberikan dengan penuh kesabaran. Dan Ucapan terimakasih kepada bapak Jaka Anggara selaku dosen pembahasan pada ujian skripsi atas saran dan masukan yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mahendra. (2020). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan, Inflasi Dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 174-186, 5–24.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2015). Republik Indonesia Indeks Pembangunan Manusia 2014. *07310.1517*, 107.
- Bahriyah, M., & Primandhana, W. P. (2022). Pengaruh Tingkat Pengangguran, Kemiskinan, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ipm Di Kabupaten Gresik. *Ekombis: Jurnal Fakultas Ekonomi*, 8(1), 32. <https://doi.org/10.35308/ekombis.v8i1.5323>
- Basuki, & Prawoto. (2017). *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS & EVIEWS*. PT Rajagrafindo Persada.
- Bitu Lailatul Yasinta. (2018). Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Belanja Infrastruktur, Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 1(4), 144.
- Fajri, R. H. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. *Economics, Accounting and Business Journal*, 1(1), 112–222.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayat, S., & Woyanti, N. (2021). Pengaruh Pdrb Per Kapita, Belanja Daerah, Rasio Ketergantungan, Kemiskinan, Dan Teknologi Terhadap Ipm Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi (JEBA)*, 23(4), 122–137.
- Hidayati, D. R., & Imaningsih, N. (2022). Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 4(4), 703–710. <https://doi.org/10.30872/jfor.v24i4.11875>
- Invantoro, D., & Efriyenti, D. (2019). Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *SCIENTIA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(2), 1–10.
- Kisnawati, B. I. (2015). Kajian Tentang Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Di Kabupaten Lombok Timur *Baiq*.
- Kuncoro, M. (2013). *Dasar - dasar ekonomika pembangunan*. UPP STIM YKPN.
- Laode, M., Engka, D. S. M., & Sumual, J. I. (2020). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara (2015-2018). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(02), 58–67.
- Listianingsih, R., Gunawan, A., & Arwani, A. (2022). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah (tahun 2016-2018)*.
- Lumi, A. N. M., Kindangen, P., & ... (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara (Studi Pada 8 Kabupaten di Sulawesi Utara). *Jurnal ...*, 23(2), 220–244.
- Mahuze, W., Masinambow, V. A. J., & Lopian, A. L. Ch. P. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Boven Digoel. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(3), 1–12.
- Maulina, U., & Andriyani, D. (2020). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan Dan Tpk Terhadap Ipm Di Indonesia. *Jurnal Ekonomika Indonesia*, 9(1), 34. <https://doi.org/10.29103/ekonomika.v9i1.3171>
- Mayang Dwi Pitaloka, & P.S Prabowo. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan

- Terhadap Ipm 14 Kabupaten Kategori “Sedang” Di Provinsi Jawa Timur. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 7(2), 1–12. <https://doi.org/10.29407/jae.v7i2.17692>
- Mirza, D. S. (2011). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap IPM Jawa Tengah. *JEJAK: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan*, 4(2), 102–113.
- Mongan, J. J. S. (2019). Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 163–176. <https://doi.org/10.33105/itrev.v4i2.122>
- MS, M. Z. &, & A, S. (2017). The Effect of Government Expenditures in Education and Health against Human Development Index in Jambi Province. *The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention*.
- Muliza, M., Zulham, T., & Seftarita, C. (2017). Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan Dan Pdrb Terhadap Ipm Di Provinsi Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(1), 51–69. <https://doi.org/10.24815/jped.v3i1.6993>
- Nahumuri, L. L. (2019). Esensi Dan Urgensi Pengeluaran Pemerintah Untuk Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v4i1.597>
- Ningrum, J. W., Khairunnisa, A. H., & Huda, N. (2020). Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2014-2018 dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 212. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1034>
- Pasuloi, Q. (2020). Pengaruh Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Makasar. *21(1)*, 1–9.
- Primandari, N. R. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Di Provinsi Sumatera Selatan Periode Tahun 2004 – 2018. *PARETO: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 25. <https://doi.org/10.32663/pareto.v2i2.1020>
- Rahim, A., Sutanty, M., & Anggita, P. (2021). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Ipm Kabupaten Sumbawa Tahun 2015-2020. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 9(3), 276–284.
- Rahmadi Islam. (2018). Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor di sektor pendidikan dan sektor kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Kampar tahun 2008 - 2017. *3*, 1–13.
- Sanggalorang, S. M. M., Rumat, V. A., & Siwu, F. D. J. (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara. *Http://Www.Sulutprov.Go.Id/Mengenal-Sulut/Sejarah/*, 15(02), 1–11.
- Saputra, R., & Muslim, I. (2018). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Sumatra Barat (Vol. 3, Issue 1).
- Setyawan, Y. P. D. (2020). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur Tahun 2010-2019. *Berita Resmi Statistik*, 53(9), 1689–1699.
- Soleha, K. G., & Fathurrahman, A. (2017). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). *Journal of Economics Research and Social Sciences*, 1(1), 40–52.
- Syofya, H. (2018). Pengaruh Tingkat Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 15(2), 177–185. <https://doi.org/10.31849/jieb.v15i2.1153>
- Tjodi, A. M., Rotinsulu, T. O., & Kawung, G. M. V. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi (Studi Di Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(8). <https://doi.org/10.35794/jpek.d.23428.19.8.2018>
- Todaro, M. P. and, & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi Jilid 2 (11th ed.)*. Erlangga.
- Umiyati, E., Amril, A., & Zulfanetti, Z. (2017). Pengaruh Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi Dan Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 1(1), 29–37. <https://doi.org/10.22437/jssh.v1i1.3764>
- Winarti, A. (2014). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kemiskinan, dan PDB Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia Periode 1992-2012. *Universitas Diponegoro*, 1–72.
- Zakaria, R. (2018). Pengaruh Tingkat Jumlah Penduduk, Pengangguran, Kemiskinan,

Pertumbuhan Ekonomi Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2016. *Dspace UII*, 1–19.